



GAMBARAN RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DESA CIMANGGU RW 009 & RW 010 KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ayu Laili Rahmiyati^{1*}, Adinda Maulida², Annisa Fitri Astuti³, Amilina Syadzia⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Unjani*

Email: ayunasihin2@gmail.com ¹

ABSTRACT

According to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2013 concerning health insurance, the definition of health insurance is insurance in the form of health protection so that participants receive health care benefits and protection in meeting basic health needs that are given to everyone who pays their contribution. The benefits guaranteed by the JKN program are in the form of comprehensive individual health services, including promotive, preventive, curative and rehabilitative services including drugs and medical materials. Residents of RW 009 and RW 010 who do not yet have a JKN card are 155 people (59%) and 109 people (41%) who already have a JKN card, the majority of the types of JKN used are BPJS/KIS 104 people (96%), and the rest use Private Health Insurance. Due to the low participation of JKN, a research was conducted to find out the factors causing the low participation of JKN. The results of the study found that residents did not understand the importance of JKN, low income, and complicated service procedures. So it is necessary to carry out socialization to increase the knowledge and participation of citizens in the JKN program.

Keywords: *JKN; Low Participation*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan suatu prioritas utama program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan dimana berada secara paripurna dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna diartikan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh meliputi kegiatan promotif, preventif, rehalibitatif, kuratif, terpadu dan bekesinambungan. (UU No 36 Tahun 2009)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, pengertian jaminan kesehatan yakni jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang membayar iurannya. Manfaat yang dijamin oleh program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (Managed care). JKN merupakan program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara gotong royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar premi secara berkala atau dibayarkan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).



Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat, didapatkan hasil bahwa warga RW 009 dan RW

010 Desa Cimanggu yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 59%. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih rendah, hal ini menandakan bahwa masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan belum sadar pentingnya memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendahnya keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8-9 Desember 2022 di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Cimanggu RW 009 dan 010. Dan besar sampel dalam penelitian ini yakni 264 jiwa yang dipilih menggunakan teknik Random Sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakter Responden Di RW 009 dan RW 010 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah

Variabel	Frekuensi	(%)
1. Umur		
0-5 tahun	25	9,5
6-11 tahun	26	9,8
12-16 tahun	28	10,6
17-25 tahun	40	15,2
26-35 tahun	38	14,5
36-45 tahun	40	15,2
46-55 tahun	34	12,8
56-65 tahun	21	7,9
>65 tahun	12	4,5
Total	264	100

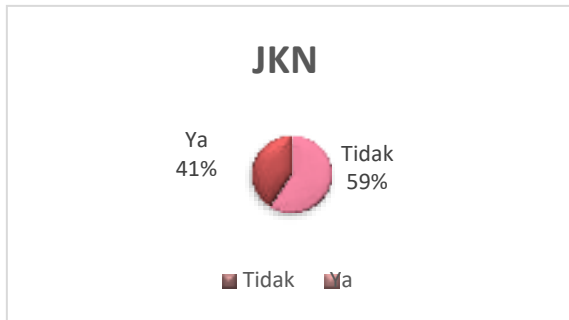
2. Pendidikan

Tidak pernah sekolah	14	5,9
Tidak tamat SD/MI	27	11,3
Tamat SD/MI	98	41,2
Tamat SLTP/MTS	63	26,5
Tamat SLTA/MA	30	12,6
Tamat PT	6	2,5
Total	238	100

3. Pekerjaan

PNS/TNI/PO	3	1,3
RLI	7	3
Pegawai swasta	14	5,8
Wirawasta/pe dagang	23	9,7
Petani	35	14,7
Buruh	88	37
Tidak Kerja Sekolah Pensiunan	67	28
Total	238	100

Pengumpulan data menggunakan dua cara yakni wawancara kepada responden dan observasi langsung. Hasil wawancara terhadap responden dapat diketahui faktor penyebab rendahnya kepersertaan JKN antara lain: (1) masyarakat belum sakit; (2) masyarakat malas; (3) masyarakat sibuk bekerja; (4) kepala keluarga kurang menyadari pentingnya JKN; (5) masyarakat malas memahami pentingnya JKN; (6) sebagian besar profesi sebagai petani; (7) lapangan pekerjaan terbatas; (8) pendapatan rendah; (9) pendapatan keluarga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari; (10) media sosial terbatas.



Gambar 1. Pengguna JKN masyarakat di Wilayah RW 009 dan RW 010 Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah

Berdasarkan diagram pie diatas masyarakat RW 009 dan RW 010 mayoritas tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 155 jiwa (59%), masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional 109 jiwa (41%). Dan jenis Jaminan Kesehatan Nasional yang digunakan BPJS/KIS/JKN 104 Jiwa (96%). Dan sisa nya sisanya menggunakan Asuransi Swasta.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa pertanyaan terbuka yang disampaikan dengan wawancara kepada responden. Ada beberapa responden yang menyatakan bahwa menjadi program JKN adalah penting. Hal ini didasari oleh beberapa kutipan sebagai berikut:

“Penting, lumayan dan pelayanan juga jadi gratis, iurannya juga gak terlalu mahal” (Responden-50)

“Kesehatan kan investasi keluarga, ya JKN penting untuk jaga-jaga kalua sakit, enak jadi lebih tenang” (Responden-39)

Sebagian besar alasan responden yang menyatakan program JKN adalah penting karena: meringankan biaya pengobatan, memberikan jaminan pelayanan ketika sakit, dan turut serta dalam mendukung program wajib dari pemerintah. Adapun beberapa kutipan alasan dari responden yang menunda kepesertaan dalam program JKN, sebagai berikut:

“Saya belum terlalu butuh, mungkin nanti saja neng” (Responden-119)

“Belum sempat sih sebenarnya, lagipula saya udah punya asuransi Kesehatan swasta kok” (Responden-87)

“Waktu itu sempat ada pendataan, tapi sampai sekarang belum ada proses lagi” (Responden-51)

Pada umumnya, alasan dari responden menunda untuk menjadi peserta dalam program JKN, yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat JKN dan prosedur kepesertaan JKN. Adanya kepemilikan Asuransi Kesehatan swasta, masyarakat yang belum merasa butuh atas asuransi Kesehatan, masyarakat yang masih bergantung pada perangkat desa. Selain faktor penundaan, adanya informasi mengenai kendala yang dialami oleh peserta JKN justru menjadi pertimbangan responden untuk memutuskan belum atau tidak menjadi peserta JKN. Sebagian besar pertimbangan adalah pengalaman orang terdekat lainnya yang pernah menggunakan manfaat layanan Kesehatan dalam program JKN. Adapun beberapa kutipan keluhan peserta JKN yang diketahui oleh responden, sebagai berikut.

“Antrian berobatnya panjang neng, apalagi kalua kamar kelas 3 penuh, akhirnya penanganan pasien jadi lama, kasihan kan yang sakit” (Responden-9)

“Prosedurnya masih ribet neng, kalau mau rujuk begitu suka berbelit-belit” (Responden-24)

“Buat sehari-hari juga masih kurang neng apalagi harus bayar iuran belum sanggup” (Responden-43)

Pada umumnya keluhan dari responden yaitu: pasien tidak ditangani dengan segera, rumitnya prosedur pelayanan terutama untuk rujukan, pendapatan yang rendah sehingga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Alasan tersebut yang menjadi pertimbangan responden yang belum menjadi peserta program JKN.

Faktor penyebab rendahnya kepesertaan JKN adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap JKN, penghasilan yang rendah sehingga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan karena prosedur pelayanan yang rumit. Penyebab masyarakat kurang memahami JKN karena kurangnya



informasi mengenai pendaftaran, besaran biaya, dan cara penggunaannya. Solusi untuk masalah tersebut adalah meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur JKN agar masyarakat menerima informasi yang benar. Selain berfokus untuk peningkatan pengetahuan, sosialisasi yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam JKN.

Jika pengetahuan seseorang baik mengenai kesehatan, pasti orang tersebut memahami pentingnya untuk menjaga kesehatan dan sadar akan manfaat dari investasi kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga akses pelayanan kesehatan lebih terjamin.

SIMPULAN

Warga RW 009 dan RW 010 Desa Cimanggu mayoritas masyarakat tidak memiliki JKN dengan jumlah 155 jiwa (59%). Sebanyak 96% masyarakat menggunakan jenis BPJS/KIS/JKN, dan sisanya menggunakan asuransi swasta. Alasan masih rendahnya keikutsertaan JKN karena warga masih kurang memahami pentingnya JKN, penghasilan yang rendah, dan rumitnya prosedur pelayanan. Maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi, selain menambah pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam program JKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawati, W., & Rachmayanti, R. D. (2018). Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i1.2018.33-39>
- Siswoyo, B. E., Prabandari, Y. S., Hendartini, Y., Kebijakan, P., Kedokteran, F., & Mada, U. G. (2015). Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi. 04(04), 118–125.
- Susilo, Y.P. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan BPJS

Kesehatan Mandiri di Kelurahan Air Manis. [pdf]. Available at: <<http://scholar.unand.ac.id/6567/>> [Accessed 22 June 2017].

Azmi AU, Tamri. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur. *J Kesehat Masy [Internet]*. 2019;3(1):96–104. Available from: ejournal.urindo.ac.id

Febya Pangestika V, Patria Jati S, Sriatmi Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan A, Kesehatan Masyarakat F. faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan BPJS. *J Kesehat Masy*. 2017;5(3):2356–3346.

Wijayanto WP. Hubungan Pengetahuan dan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Terhadap Aksesibilitas BPJS. *J Aisyah J Ilmu Kesehat*. 2017;2(2):131–40.

Wildayati, Noorhidayah, Yeni R. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta Jkn-Kis Di Wilayah Kerja Puskesmas Pulau Kupang Kabupaten Kapuas. *Diss Univ Islam Kalimantan Selatan*. 2020;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.